

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

KPPN adalah singkatan dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. KPPN Palembang sebagai instansi vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral Perbendaharaan, maka tugas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang adalah melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan fungsinya, KPPN Palembang menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu penerbitan surat perintah pencairan dana dari kas negara atas nama Menteri Keuangan (Bendahara Umum Negara) dan penyaluran pembiayaan atas beban APBN. Disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. UU Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Informasi keuangan yang berkualitas harus memenuhi beberapa karakteristik kualitatif sebagaimana yang diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (PermenDesa PDTT) No.21 Tahun 2015, dalam pelaksanaan desa tersebut harus terdapat aspek tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Idealnya ketiga hal tersebut ada dalam diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah pemerintah. Penerapan hal tersebut harus didukung dengan tersedianya sumber daya aparatur yang berkopeten untuk menerapkan prinsip *Good Governance*.

Kebutuhan akan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi diperlukan bagi semua pihak, baik lembaga swasta maupun instansi pemerintahan. Hal ini disebabkan peran Sumber Daya Manusia (SDM) sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan pekerjaan, di mana SDM yang kompeten merupakan salah satu asset penting bagi lembaga untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Menurut Danang Sunyoto (2012:64) beban kerja adalah yang terlalu banyak dapat menyebabkan ketegangan dalam diri seseorang sehingga menimbulkan stress. Beban kerja yang meningkat akan berpengaruh pada penurunan kemampuan kerja pegawai yang akibatnya kualitas kerja pegawai sangat rendah dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Jika kemampuan pegawai lebih tinggi daripada tuntutan pekerjaan, akan muncul perasaan bosan.

Standar Akuntansi Pemerintahan menyebutkan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prsyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, yakni: yang pertama itu harus Relevan, yang berarti informasi harus memiliki *feedback value*, *predictive value*, tepat waktu dan lengkap. Yang kedua harus

Andal, yang berarti informasi harus memiliki karakteristik penyajian jujur, veriability, netralitas. Yang ketiga harus Dapat dibandingkan, berarti laporan keuangan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Yang terakhir harus Dapat dipahami, berarti bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk.

KPPN tidak hanya menerapkan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) melainkan juga selaku Sistem Akuntansi Instansi. Laporan keuangan kementerian/lembaga dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Sistem Akuntansi Instansi terdiri atas Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (Simak-BMN). Sistem Akuntansi Instansi dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan kementerian/lembaga yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), sedangkan Simak BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan BMN. Laporan keuangan kementerian /lembaga dapat diuji keandalannya dengan laporan keuangan yang dihasilkan oleh unit kerja melalui proses rekonsiliasi. Proses rekonsiliasi adalah proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan sistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama sehingga menghasilkan data yang akurat dan handal (PMK No.210/PMK.05/2013).

KPPN Palembang telah meraih prestasi yang sangat memuaskan. KPPN Palembang berperan sangat penting dalam menunjang kelancaran dan pemerataan pembangunan Sumsel. Kita berharap KPPN Palembang terus meningkatkan prestasinya, khusus dalam memeberikan pelayanan. Saat ini pelayanan sudah cukup baik terbukti berhasil menjadi salah satu yang terbaik di Indonesia,ungkapnya ".Sementara itu, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel, Sudarso mengatakan, KPPN Palembang mengelola dana terbesar di wilayah Sumatera dan terbesar ke-9 se-Indonesia. Dari seluruh wilayah Sumsel 88 persen pengelolaan dilakukan di KPPN Palembang. Anggaran ini baik terkait Jakabaring Sport City, Jembatan Musi IV dan lainnya. Sejalan dengan kebijakan

pemerintah KPPN telah melakukan pengembangan wilayah anti korupsi dan upaya pengembangan pelayanan lainnya. “Melalui penilaian ini diharapkan akan menjadi keyakinan yang memadai tentang seberapa besar KPPN dalam memberikan pelayanan,” terangnya dalam acara yang bertajuk Mewujudkan KPPN Palembang Sebagai Kantor Pelayanan Terbaik Demi Bakti Mendukung Sumsel Gemilang itu. (korankito.com/ril/syym). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi, Beban Kerja Operator SAI, dan Penerapan SAP terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada KPPN Palembang Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang saya kemukakan diatas, maka penulis mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang Provinsi Sumatera Selatan ?
2. Bagaimana Pengaruh Beban Kerja Operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang Provinsi Sumatera Selatan ?
3. Bagaimana Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang Provinsi Sumatera Selatan ?
4. Bagaimana Pengaruh Kompetensi, Beban Kerja Operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang Provinsi Sumatera Selatan ?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan sebagai berikut :

1. Penelitian ini berfokus pada Pengaruh Kompetensi, Beban Kerja Operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI), dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan.
2. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Kompetensi, Beban Kerja Operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI), dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi bahwa :

1. Bagi Peneliti
Dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya untuk mata kuliah akuntansi sektor publik 2 serta mampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada.
2. Bagi Instansi
Sebagai masukan dan gambaran dari Pengaruh Kompetensi, Beban Kerja Operator Sistem Akuntansi Instansi (SAI), dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah sektor publik.

